

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum), Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008.

Hans Kelsen, Pure Theory of law (Berkeley: Universitas of California Press, cetakan ulang 1968).

Jimly Asshidqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI: Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

Jimly Asshiddiqie, 2014, Prihal Undang-Undang, Rajawali Press, Jakarta.

King Faisal Sulaiman, Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

M. Laica Marzuki Berjalan-jalan di Ranah Hukum, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Maria Farida Indrati S., 2010. Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius

Sudikno Metrokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberty,2002.

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2009.

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press, 2015.

Sudikno Mertokusumo dalam Y Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Desertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12Desember 2007.

Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Pasal 5 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Sesuai Dengan Urutan BAB, Pasal, dan Ayat (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Data Elektronik:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa/> (diakses pada 28 april 2016).

<http://www.ksap.org/sap/desa/>, di akses pada tanggal 27 april 2016.

<http://www.artikelsiana.com/2015/04/asas-pembentukan-peraturan-perundang.html>

(diakses pada 28 april 2016).

<https://dodiksetiawan.wordpress.com/2011/11/21/uu-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> (diakses pada 28 april 2016).

<https://dodiksetiawan.wordpress.com/2011/11/21/uu-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> (diakses pada 28 april 2016).